

RISIKO NAIKNYA PERINGKAT RI MENJADI NEGARA MAJU

Oleh : Tim Riset Stabilitas

Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dari daftar negara berkembang. Kebijakan yang berlaku per 10 Februari 2020 juga dikenakan terhadap 24 negara lain di dunia. Ke dua puluh empat negara tersebut antara lain Albania, Armenia, Bulgaria, Argentina, Brazil, China, Kolombia, Kosta Rika, Georgia, Hong Kong, Kazakhstan, India dan Republik Kirgis.

Pemerintahan Donald Trump menaikkan peringkat RI menjadi negara maju yang membuat beberapa fasilitas yang didapat sebelumnya dihilangkan. Lalu apa saja risiko yang dihadapi ekonomi Indonesia?

Kabar tersebut bukan kabar gembira, terlebih ditengah amuk perang dagang dan ancaman perlambatan ekonomi dunia akibat korona. Perubahan status tersebut memunculkan dampak yang perlu dimitigasi secara lebih detail dan tepat, terutama kegiatan ekspor dan impor –dan turunannya– ke Amerika Serikat. Lebih lanjut, kriteria ini dianggap bermuatan politis yang menguntungkan negeri Paman Sam.

Kriteria

Terdapat perbedaan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dan Amerika Serikat dalam pengkategorian negara maju, dalam hal ini untuk kasus Indonesia. Kriteria Bank Dunia didasarkan pada GNI (*grossnationalincome*) per kapita. Sedangkan kriteria Amerika Serikat didasarkan pada porsi ekspor negara Indonesia terhadap porsi ekspor dunia.

Kategori Bank Dunia terhadap klasifikasi negara berdasarkan pendapatan berubah setiap tahun. Per 2019, terdapat klasifikasi baru pembagian tersebut. Pada 2018, negara yang masuk ke dalam *low income* berada pada GNI per capita kurang dari 996 dollar AS per kapita tahun. Pada tahun 2019, *threshold*-nya dinaikkan menjadi 1.026 dollar AS per kapita per tahun.

Pada 2019, negara dengan kategori *lower middle income* berada pada rentang 1.026-3.995 dollar AS/ kapita/ tahun. Bagi negara dengan GNI per kapita 3.996-12.375 dollar AS/kapita/tahun masuk dalam kategori negara *upper middle income country*. Sedangkan negara dengan GNI per kapita lebih dari 12.375 dollar AS /kapita/tahun, masuk kategori negara maju (Tabel 1). Apabila menggunakan klasifikasi tersebut, maka Indonesia masuk pada kategori *upper middle income* dengan GNI per kapita per tahun sekitar 4 ribu dollar AS.



Tabel I. Kategori Negara Berdasarkan GNI Per Kapita

Treashold	2019 (Juli)	2018 (Juli)
Low Income		
Lower-middleincome	1.026-3.995	996-3.895
Uppe-middleincome	3.996-12.375	3.896-12.055
HigherIncome	>12.375	>12.055

Sumber : <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020>

Kriteria yang digunakan oleh USTR dalam mencoret sebuah negara dari daftar negara berkembang adalah porsi perdagangan mereka terhadap total perdagangan dunia. Threshold untuk menjadi negara maju adalah 0,5 persen *share* total perdagangan terhadap perdagangan dunia.

Indonesia sudah melebihi threshold yang dipakai oleh USTR dalam mengategorikan negara berkembang. Pada 2018, porsi ekspor Indonesia ke total ekspor dunia mencapai 0,93 persen. Sedangkan kontribusi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dibandingkan dengan total ekspor Indonesia sebesar 10,25 persen. Apabila dibandingkan total ekspor dunia, total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat baru 0,1 persen. (Tabel 2)

Konsekuensi

Kebijakan negara Paman Sam ini memiliki konsekuensi bagi perdagangan Indonesia. Konsekuensi tersebut antara lain: *Pertama*, berkurangnya perlakuan khusus perdagangan Indonesia di hadapan Paman Sam. Hal ini terwujud dalam *Special Differential Treatment (SDT)* yang tersedia dalam *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* tidak lagi berlaku bagi Indonesia.

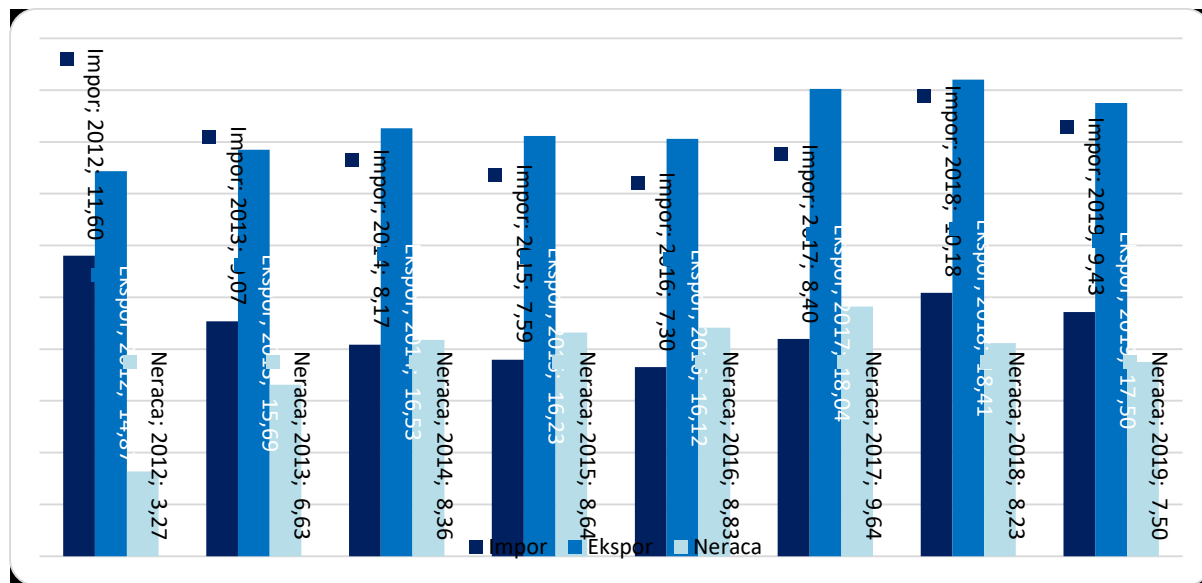
Akibat lanjutannya adalah *deminimis thresholds* untuk marjin subsidi agar suatu penyelidikan anti-subsidi dapat dihentikan berkurang menjadi kurang dari 1 persen dan bukan kurang dari 2 persen. Adanya penurunan *deminimis threshold* ini berpeluang bahwa investigasi akan adanya kecurigaan dumping atau subsidi produk-produk Indonesia di Amerika Serikat semakin mudah. Jika ini terjadi, akan menganggu kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

Kedua, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi defisit. Defisit ini akibat terhambatnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat akibat barang yang tidak kompetitif dikarenakan bea impor yang tinggi. Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan AS terjadi selama ini, setidaknya pada kurun waktu 2012-2020.

Ketiga, hubungan tarikan ke belakang dari aktivitas sektor-sektor yang terdampak. Aktivitas tersebut antara lain perbankan dalam hal pinjaman, pajak, pekerjaan keterkaitan sektor tersebut dengan sektor lain. Keterkaitan yang paling tampak adalah keterkaitan bahan baku atau *derived demand*.



Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat 2012-2019*
(Miliar Dollar AS)



*Data sampai November 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2012, surplus perdagangan Indonesia - Amerika Serikat sebesar 3,27 miliar dollar AS. Surplus tersebut diperoleh dari besaran ekspor Indonesia sebesar 14,87 miliar dollar AS dan impor Indonesia dari Paman Sam sebesar 11,6 miliar dollar AS. Surplus tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 dengan puncaknya pada 2017.

Pada tahun 2017, surplus perdagangan non migas Indonesia-Amerika Serikat sebesar 9,64 miliar dollar AS. Surplus tersebut menurun di 2019 menjadi 7,5 miliar dollar AS. Memasuki Januari 2020, perdagangan Indonesia-Amerika Serikat langsung mencetak surplus sebesar 1,01 miliar dollar AS. Angka ini lebih besar apabila dibandingkan dengan periode Januari 2019 sebesar 804 juta dollar AS.

Mitigasi akan lebih kentara jalannya apabila kita melihat struktur perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Sejak tahun 2013, setidaknya ada 10 komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Kesepuluh kelompok barang tersebut adalah barang berkode HS 62: Pakaian Jadi Bukan Rajutan, HS 61: Barang-barang Rajutan, HS: 40: Karet dan Barang dari Karet, HS: 64: Alas Kaki, HS: 03: Ikan dan Udang, HS: 85: Mesin/Peralatan Listrik, HS: 94: Perabot, Penerangan Rumah, HS: 15: Lemak & Minyak Hewan/Nabati, HS: 16: Daging dan Ikan Olahan dan HS: 84: Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (tabel 2).

Total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat melonjak lebih dari satu kali lipat dari 15,69 miliar dollar Amerika Serikat menjadi 34,44 miliar dollar AS. Dalam kelompok 10 komoditas barang utama yang di ekspor ke Amerika Serikat, hampir semua barang mengalami kenaikan nilai ekspor.

Tiga barang terbesar adalah HS 62: Pakaian Jadi Bukan Rajutan yang naik 2 kali lipat dari 1,91 miliar dollar AS menjadi 4,28 miliar dollar AS atau 12,42 persen. Selanjutnya barang berkode HS 61: Barang-barang Rajutan, naik dari 1,91 miliar dollar AS menjadi 4,23 miliar dollar



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Amerika Serikat atau 12,29 persen. Kemudian barang dengan kode HS: 40: Karet dan Barang dari Karet, naik dari 2,18 miliar dollar AS di 2013 menjadi 3,07 miliar dollar AS (8,93 persen).

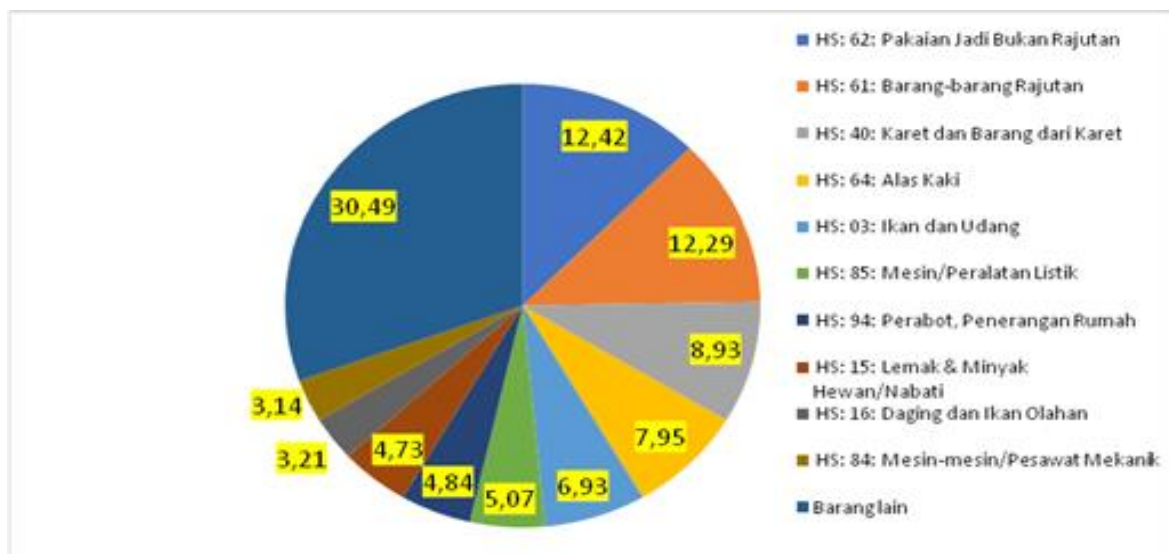
10 Komoditas Utama Ekspor Indonesia ke AS 2013-2019 (Miliar dollar AS)

Keterangan	2013	2015	2017	2019*
HS: 62: Pakaian Jadi Bukan Rajutan	1.91	1.98	2.15	4.28
HS: 61: Barang-barang Rajutan	1.91	1.72	1.99	4.23
HS: 40: Karet dan Barang dari Karet	2.18	1.65	1.93	3.07
HS: 64: Alas Kaki	1.03	1.27	1.39	2.74
HS: 03: Ikan dan Udang	0.92	0.98	1.39	2.39
HS: 85: Mesin/Peralatan Listrik	1.18	1.23	1.06	1.75
HS: 94: Perabot, Penerangan Rumah	0.65	0.67	0.71	1.67
HS: 15: Lemak & Minyak Hewan/Nabati	0.46	0.64	1.26	1.63
HS: 16: Daging dan Ikan Olahan	0.40	0.46	0.41	1.11
HS: 84: Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	0.61	0.64	0.65	1.08
Total	15.69	16.23	18.04	34.44

*Data sampai November 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik

Komposisi Ekspor Indonesia ke AS Tahun 2019* (%)



*Data sampai November 2019

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kesepuluh komoditas utama tersebut di atas, memiliki share yang berbeda-beda terhadap total ekspor Indonesia. Ada barang-barang yang merupakan 50 persen lebih dari total ekspor Indonesia seperti barang kode HS 62: Pakaian Jadi Bukan Rajutan yang dan barang berkode HS 61: Barang-barang Rajutan. Ekspor kedua komoditas tersebut ke Amerika Serikat menyumbang masing-masing 50,62 persen dan 54,7 persen total ekspor Indonesia untuk masing-masing barang.

Pada peringkat ketiga hingga kelimaterdapat barang berkode HS: 40: Karet dan Barang dari Karet yang menyumbang 25,66 persen terhadap total ekspor Indonesia pada kelompok barang



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

tersebut. Kemudian komoditas berkode HS: 64: Alas Kaki dengan *share* 27,75 persen terhadap total ekspor Indonesia pada kelompok barang tersebut. Barang berkode HS: 03: Ikan dan Udang memiliki *share* 39,98 persen terhadap total ekspor Indonesia pada kelompok barang tersebut. Kemudian barang berkode HS: 94: Perabot, Penerangan Rumah yang memiliki *share* 42,49 persen terhadap total ekspor Indonesia pada kelompok barang tersebut.

Variasi Share Ekspor Indonesia

Kode HS	Share Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat		Share Ekspor Total Indonesia terhadap Total Ekspor Dunia
	dibandingkan dengan ekspor Indonesia	dibandingkan dengan Total Ekspor Dunia	
Total	10.25	0.10	0.93
62	50.62	0.96	1.89
61	54.70	0.93	1.69
40	25.66	0.85	3.33
64	27.75	0.97	3.50
3	39.98	1.06	2.65
15	4.66	1.01	21.64
85	9.37	0.03	0.32
27	1.96	0.03	1.68
94	42.49	0.30	0.70
84	9.85	0.03	0.26

Sumber : UN Comtrade, 2019

Berdasarkan elaborasi data perdagangan di atas, maka sektor yang diprediksi akan paling terdampak adalah sektor tekstil, perikanan, perkebunan dan industri elektronik dan mesin serta industri pengolahan makanan. Sektor tersebut mengacu pada kelompok 10 besar barang yang diekspor ke Amerika Serikat.

Apabila ada pengenaan tarif lebih tinggi terhadap barang-barang dari sektor tersebut oleh Amerika Serikat, maka Indonesia harus bersaing dengan produk yang sama dari negara lain. Pada kelompok barang berkode HS 61 misalnya, Indonesia sebagai pengeksport terbesar ketiga setelah China dan Vietnam, harus bersaing dengan negara-negara di bawah Indonesia.

Hal tersebut relevan karena negara-negara di bawah Indonesia tersebut masih masuk dalam daftar negara berkembang versi USTR. Negara-negara tersebut adalah Honduras dengan nilai ekspor produk HS 61 pada tahun 2018 sebesar 2,2 miliar dollar AS, India 1,8 miliar dollar AS, Kamboja 1,8 miliar dollar AS, El Salvador 1,7 miliar dollar AS, Bangladesh 1,5 miliar dollar AS, Mexico 1,3 miliar dollar AS dan Guatemala 1,2 miliar dollar AS.

Pemerintah harus memastikan ekspor ke Amerika Serikat bisa terus berlangsung. Pekerjaan rumah pertama pasca keputusan USTR mengeluarkan Indonesia adalah *pertama* meningkatkan daya saing produk yang masuk 10 besar ekspor ke Amerika Serikat. Hal ini penting agar produk Indonesia bisa bersaing dengan produk negara lain masuk ke Amerika Serikat, dimana negara tersebut masih mendapatkan *privilege*. *Kedua*, mencari alternatif pasar baru selain Amerika Serikat. Pasar yang prospektif adalah pasar Afrika, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Alternatif pasar penting untukantisipasi tidak bisa bersaingnya produk Indonesia di Amerika Serikat.

Ketiga, menyiapkan insentif dan asistensi bagi pelaku industri dalam negeri yang terkena



Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

dampak. Insentif bisa berupa keringanan pajak setara dengan produk yang terdampak akibat kebijakan Amerika Serikat ini. Ketiga mitigasi tersebut setidaknya bisa menyelamatkan dampak lanjutan kredit macet di sektor yang terdampak.

File ini dapat diunduh melalui : <http://lppi.or.id/produk/riset/>

Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :

Divisi Corporate Secretary

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Telp: (021) 71790919 | Email: dcsc@lppi.or.id

Website : www.lppi.or.id

Disclaimer: Tidak ada satu bagian pun dalam publikasi ini yang ditujukan sebagai promosi, penawaran, rekomendasi, nasihat investasi, atau untuk membentuk dasar keputusan-keputusan strategis atas suatu kegiatan, produk, dan/atau jasa dari pihak manapun. Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak manapun.

